

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keterlibatan militer dalam pemilihan umum di Indonesia pada awal-awal reformasi merupakan wacana yang kontroversial. Hal ini disebabkan karena adanya penolakan dari sebagian masyarakat karena disinyalir adanya *mainstream* berpikir dikalangan militer yang tidak terlepas dari Orde Baru

Pada masa Orde Baru peranan militer dalam pemerintahan didukung oleh adanya 'dwifungsi', **dwifungsi** adalah suatu doktrin di lingkungan militer Indonesia yang menyebutkan bahwa TNI memiliki dua tugas, yaitu pertama menjaga keamanan dan ketertiban negara dan kedua memegang kekuasaan dan mengatur negara. Dengan peran ganda ini, militer diizinkan untuk memegang posisi di dalam pemerintahan.

Konsep dwifungsi TNI pertama kali muncul dalam bentuk konsep "Jalan Tengah" yang di usulkan pada tahun 1958 oleh Jendral A.H. Nasution, pimpinan TNI-AD pada saat itu, kepada Presiden Soekarno untuk memberikan peluang bagi peranan terbatas TNI di dalam pemerintahan sipil.

...memberikan cukup saluran pada tentara kita bukan sebagai organisasi, tetapi sebagai perorangan-perorangan yang menjadi eksponen daripada organisasi kita, (untuk) turut serta menentukan, kebijaksanaan negara kita pada tingkat-tingkat yang tinggi (A.H. Nasution 1958)

Pada masa pemerintahan Soeharto, konsep ini mengalami perubahan dan menjadikan TNI secara organisatoris (bukan perorangan) menduduki jabatan-

jabatan strategis di lingkungan pemerintahan seperti menteri, gubernur, bupati, serta lembaga-lembaga legislatif dalam wadah fraksi ABRI, tahun 2000 disepakati untuk menghapus doktrin ini. Almond dan Verba (Philip Althoff: 1986:165) menyimpulkan bahwa:

“Membicarakan masalah politik.... (adalah) erat berkaitan dengan problem pendidikan. Frekuensi dari bicara masalah politik naik dengan tajam dari tingkat dasar ke tingkat lanjutan ke tingkat-tingkat universitas di semua negara, tetapi perbedaan diantara tingkatan pendidikan ternyata tidak setajam di Amerika.....”

Seiring jalannya waktu, paradigma pun mulai berubah, keterlibatan militer dalam pemilihan umum tidak lagi menjadi wacana yang kontroversial. Penolakan masyarakat maupun mahasiswa terhadap calon dengan latar belakang militer dengan pemilihan umum sudah bukan hal yang perlu di perjuangkan lagi. Menurut Herman Ibrahim dalam artikelnya mengatakan:

“suka atau tidak suka, watak TNI memang mempengaruhi aura politik nasional dari masa ke masa. Banyak hal yang negatif memang, jika saat itu demokrasi menjadi satu-satunya ukuran. Namun satu hal yang positif, apa yang dilakukan TNI dalam politik senantiasa didasarkan pada keberpihakan untuk kepentingan umum. Bahkan dalam kasus culik menculik, dulu TNI melakukannya untuk rakyat”

Maka disini timbul permasalahan mendasar dari penulis yaitu bagaimana persepsi mahasiswa terhadap cagub (calon gubernur) dan cawagub (calon wakil gubernur) yang berlatar belakang militer dalam pilgub (pemilihan gubernur) Jawa Barat 2008. Lalu bagaimanakah persepsi mahasiswa tentang prospek reformasi internal TNI dikaitkan dengan kemunculan kandidat berlatar belakang militer

selain itu bagaimanakah orientasi militer dari calon yang berlatar belakang militer dalam pilgub Jabar 2008.

Persepsi aktivis mahasiswa di Jawa Barat terhadap cagub dan cawagub Jabar yang berlatar belakang militer menjadi perihal yang menarik untuk dikaji lebih mendalam, untuk itu penulis ingin menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul: Persepsi Mahasiswa Tentang Keterlibatan Calon Gubernur yang Berlatar Belakang Militer Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Barat (studi kasus terhadap pandangan aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa ITB, UNPAD, dan UPI Bandung tentang calon Gubernur dan calon wakil Gubernur dengan latar belakang militer pada pemilihan Gubernur Jawa Barat 2008).

B. Rumusan Masalah dan Pembatasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, secara umum yang menjadi permasalahan dalam penelitian adalah “bagaimana keterlibatan militer dalam pilgub Jabar 2008 menurut pandangan mahasiswa. Bagaimana tanggapan aktivis mahasiswa tentang prospek reformasi internal TNI dikaitkan dengan kemunculan kandidat berlatar belakang militer”, serta bagaimanakah orientasi militer dari calon yang berlatar belakang militer dalam pilgub Jabar 2008.

2. Pembatasan Masalah.

Berdasarkan perumusan masalah di atas, secara operasional dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi aktivis mahasiswa terhadap pencalonan orang-orang yang berlatar belakang militer sebagai cagub dan cawagub Jabar?
 - 1.1 Bagaimana paradigma baru aktivis mahasiswa ITB, UNPAD, UPI terhadap keterlibatan militer dalam pemilu, serta bagaimana apabila paradigma tersebut dibandingkan dengan paradigma aktivis mahasiswa pada awal reformasi?
2. Bagaimana tanggapan aktivis mahasiswa tentang prospek reformasi internal TNI dikaitkan dengan kemunculan kandidat berlatar belakang militer?
 - 2.1 Bagaimana tanggapan aktivis mahasiswa tentang prospek reformasi internal TNI dikaitkan dengan kemunculan kandidat berlatar belakang militer serta bagaimana pula aktivis mahasiswa menilai sikap netral TNI terhadap calon berlatar belakang militer?
 - 2.2 Bagaimana aktivis mahasiswa menilai dwifungsi ABRI. Tidakah gejala ini menimbulkan kekhawatiran dari aktivis mahasiswa akan kembalinya TNI menjalankan dwifungsi ABRI?
3. Bagaimanakah orientasi cagub dan cawagub yang berlatar belakang militer terhadap pembangunan politik khususnya pengembangan generasi muda?
 - 3.1 Bagaimana usaha tim sukses cagub dan cawagub yang berlatar belakang militer dalam kampanye politik dikalangan mahasiswa dan kalangan militer serta bagaimana pula tim sukses menilai respon aktivis mahasiswa di Jawa Barat pada pilgub Jabar 2008?
 - 3.2 Bagaimanakah orientasi cagub dan cawagub yang berlatar belakang militer terhadap pembangunan politik khususnya pengembangan generasi muda?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

UMUM :

Tujuan umum dari penelitian ini adalah mendeskripsikan keterlibatan militer dalam pilgub Jabar 2008 berdasarkan konstruksi pandangan dan pendapat aktivis mahasiswa

KHUSUS :

Sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

1. Paradigma baru aktivis mahasiswa ITB, UNPAD, UPI terhadap keterlibatan militer dalam pemilu, serta bagaimana apabila paradigma tersebut dibandingkan dengan paradigma aktivis mahasiswa pada awal reformasi.
2. Tanggapan aktivis mahasiswa tentang prospek reformasi internal TNI dikaitkan dengan kemunculan kandidat berlatar belakang militer serta penilaian aktivis mahasiswa terhadap sikap netral TNI terhadap calon berlatar belakang militer.
3. Penilaian aktivis mahasiswa terhadap dwifungsi ABRI serta kekhawatiran dari aktivis mahasiswa akan kembalinya TNI menjalankan dwifungsi ABRI.
4. Usaha tim sukses cagub dan cawagub yang berlatar belakang militer dalam kampanye politik dikalangan mahasiswa dan kalangan militer serta penilaian pula tim sukses terhadap respon aktivis mahasiswa di Jawa Barat pada pilgub Jabar 2008.
5. Orientasi cagub dan cawagub yang berlatar belakang militer terhadap pembangunan politik khususnya pengembangan generasi muda.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkenaan dengan sistem pemilihan kepala daerah.
2. Secara praktis, penelitian ini memberikan masukan bagi peningkatan kualitas Pilkada di Jabar sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

E. Asumsi Penelitian

Asumsi diartikan sebagai anggapan sementara, asumsi dalam kamus analisa politik (Jack Plano dkk., 1994:9) merupakan proposisi yang dianggap benar tanpa diperlukan pembuktian. Asumsi juga dikatakan sebagai pra anggapan.

Selanjutnya dalam penulisan karya ilmiah, terbitan Universitas Pendidikan Indonesia (2003:46), fungsi asumsi dalam sebuah skripsi, tesis atau disertasi itu. Asumsi dapat berupa teori, evidensi-evidensi dan dapat pula pemikiran peneliti itu sendiri. Apapun materinya, asumsi tersebut harus sudah merupakan sesuatu yang tidak perlu dipersoalkan atau dibuktikan lagi kebenarannya: sekurang-kurangnya bagi masalah yang akan di teliti pada masa itu.

Dalam penelitian ini penulis memiliki sejumlah asumsi diantaranya ialah berikut:

1. Robert E. Goodin dan Klinegman (Cecep Darmawan; 1998) perilaku politik, yaitu mengulas tuntas perilaku politik dalam konteks partisipasi politik maupun dalam tindaakn-tindakan perjuangan politiknya.

2. A.H Nasution, 1958. Dwifungsi ialah memberikan cukup saluran pada tentara bukan sebagai organisasi, tetapi sebagai perorangan yang menjadi eksponen daripada organisasi, (untuk) turut serta menentukan, kebijaksanaan negara kita pada tingkat-tingkat yang tinggi. Pada masa Orde Baru pengertian ini di salah artikan dengan menghilangkan orang-perorangan yang menjadi sebagai organisasi, sehingga terdapatnya peranan TNI pada lembaga legislatif sebagai organisasi yaitu fraksi ABRI.
3. UU TNI pasal 2 ayat 4; tentara profesional, yaitu tentara yang terlatih dan terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serah mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah di ratifikasi.
4. UU TNI No.34 tahun 2004 e berbunyi UU RI Nomor 2 tahun 1988 tentang ABRI (Lembaga Negara RI Tahun 1988 Nomor 4, tahun lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3368) dinilai tidak sesuai lagi dengan perubahan kelembagaan ABRI menjadi TNI yang didorong oleh tuntutan reformasi dan demokrasi, perkembangan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga undang-undang tersebut perlu diganti.
5. Mayjen TNI Suroyo Gino (2007) mengatakan bahwa TNI di Jawa Barat menjunjung tinggi netralitas pada pemilihan Gubernur dan pemilihan wakil Gubernur Jawa Barat 2008, maka kurang beralasan apabila Herman dalam artikelnya mengatakan bahwa “dikalangan TNI muncul sinylemen seakan-akan loyalitas prajurit dipertaruhkan untuk mendukung salah satu kandidat.

6. Masdar dkk (1999:127) mengungkapkan, salah satu syarat pemilu demokratis adalah tersedia mekanisme rekrutmen politik bagi calon-calon wakil rakyat yang demokratis. Harus ada mekanisme pemilihan calon wakil rakyat yang tidak top down (diturunkan oleh elite partai dan penguasa, dari atas) melainkan bottom up (berdasarkan inisiatif mandiri dan aspirasi dari bawah). Praktik dropping calon wakil rakyat yang berjalan di Indonesia selama ini adalah sebuah kekeliruan, syogyanya tidak ada mekanisme eksternal partai yang dapat membatalkan keputusan demokratis yang telah di buat dalam partai.

F. Penjelasan Istilah

1. Persepsi

Banyak para ahli mengemukakan tentang pengertian persepsi seperti di bawah ini:

- 1) Menurut Gibson (1986:54) Persepsi adalah cara pandang yang timbul karena adanya respon terhadap stimulus mencakup 1. Stimulus (*inputs*) 2. Pengorganisasian stimulus 3. Penerjemahan atau penafsiran stimulus yang telah di organisasikan dengan cara yang dapat mempengaruhi perilaku dan membentuk sikap sehingga orang dapat cenderung menafsirkan perilaku orang lain sesuai dengan keadaannya sendiri.
- 2) Menurut R.Jalaludin (1998:51) persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.

- 3) Menurut Ruch (1967:300) persepsi adalah suatu proses tentang petunjuk-petunjuk inderawi (*sensory*) dan pengalaman masa lampau yang relevan diorganisasikan untuk memberikan kepada kita gambaran yang terstruktur bermakna pada suatu situasi tertentu.
- 4) Atkinson dan Hilgard (1991:201) mengemukakan bahwa persepsi adalah proses dimana kita menafsirkan dan mengorganisasikan pola stimulus dalam lingkungan.
- 5) Gibson dan Donely (1994: 53) menjelaskan bahwa persepsi adalah proses pemberian arti terhadap lingkungan seorang individu.

Setelah kita kaji definisi persepsi menurut para ahli diatas, maka kita bisa menarik kesimpulan mengenai ciri-ciri persepsi sebagai berikut:

- 1) Persepsi sebagai cara pandang
- 2) Adanya stimulus (*inputs*), pengorganisasian stimulus dan penerjemahan atau penafsiran stimulus
- 3) Adanya pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.
- 4) Adanya proses pemberian arti terhadap lingkungan seorang individu.

Persepsi meliputi juga kognisi (pengetahuan), yang mencakup penafsiran objek, tanda dan orang dari sudut pengalaman yang bersagkutan (Gibson,1986:54) selaras dengan pernyataan tersebut Krech, dkk (dalam Sri Tjahjorini Sugiharto 2001:19) mengemukakan bahwa persepsi seseorang ditentukan oleh dua faktor utama, yakni pengalaman masa lalu dan faktor pribadi.

2. Paradigma

Paradigma adalah seperangkat bentuk yang berbeda-beda dari sebuah kata pada ungkapan *verb paradigm*; sehingga munculah istilah hubungan paradigmatic relationship, atau jenis sesuatu, pola, model seperti dalam ungkapan *a Paradigm for others to copy*. (Alwasilah. 2006)

3. Mahasiswa

Abdur Rahim (komaba 2002) mengemukakan bahwa mahasiswa adalah segmen pemuda yang tercerahkan karena memiliki kemampuan intelektual. Menurut Yohanes Somawiharja (1998 : 20) mahasiswa/i adalah seseorang yang sedang mempersiapkan diri dalam keahlian tertentu dalam tingkat pendidikan tinggi.

4. Militer

Menurut UU No 34/2004 'militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan-perundang-undangan'. Sedangkan tentara adalah warganegara yang dipersiapkan dan di persenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer ataupun ancaman bersenjata. Sedangkan tentara profesional, yaitu tentara yang terdidik, diperlengkapai secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum Nasional, dan hukum Internasional yang telah di ratifikasi.

5. Dwifungsi

Dwifungsi adalah suatu doktrin di lingkungan militer Indonesia yang menyebutkan bahwa TNI memiliki dua tugas, yakni pertama menjaga keamanan dan ketertiban negara dan kedua memegang kekuasaan dan mengatur negara. Dengan peran ganda ini, militer diizinkan untuk memegang posisi di dalam pemerintahan (A.H. Nasution. 1958)

6. Gubernur

Kata “Gubernur” berasal dari bahasa Portugis “*governador*”, bahasa Spanyol “*gobernador*” atau bahasa Belanda “*gouverneur*”. Bentuk belanda ini mirip dengan bahasa Perancis yang arti harafiahnya adalah “pemimpin”, “penguasa” atau “yang memerintah”.

Gubernur, dalam konteks otonomi daerah di Indonesia adalah Kepala Daerah untuk daerah Provinsi. Pada dasarnya, Gubernur memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang di tetapkan bersama DPRD. Gubernur di pilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di Provinsi setempat; sehingga dalam hal ini Gubernur bertanggung jawab kepada rakyat.

7. Pemilihan Gubernur

Pemilihan gubernur langsung berarti mengembalikan hak-hak dasar kepada masyarakat di daerah dengan memberi kewenangan yang utuh dalam rangka rekrutment politik lokal secara demokrasi. (Prihatmoko, 2005:71)

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan di gunakan oleh peneliti yaitu studi kasus dengan metode pendekatan kualitatif. Penelitian yang kualitatif digunakan jika data yang akan diambil merupakan data kualitatif. Yaitu yang tersaji dalam bentuk kata-kata atau kalimat, keseluruhan data yang diperoleh diolah dan disajikan dalam bentuk uraian naratif bukan dalam bentuk statistik, sehingga akan dapat menjawab permasalahan yang akan di teliti secara sistematis dan logis. Lincoln dan Guba (Sukmadinata 2005:60) melihat penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bersifat naturalistik. Penelitian ini bertolak dari paradigma naturalistik. Bahwa “kenyataan ini berdimensi jamak, peneliti dan yang akan diteliti bersifat interaktif, tidak bisa dipisahkan, suatu kesatuan terbentuk secara simultan, dan timbal balik, tidak mungkin memisahkan sebab akibat, dan penelitian ini melibatkan nilai-nilai

Merujuk pada pendapat Lincoln di atas, maka penulis dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi mahasiswa terhadap peran militer dalam pilgub Jabar 2008.

Penelitian kualitatif dilakukan dalam skala kecil, kelompok yang memiliki kekhususan, keunggulan, inovasi, atau bisa juga bermasalah (Sukmadinata, 2005:98). Oleh sebab itu penelitian ini ditujukan untuk melihat persepsi mahasiswa tertentu yaitu mereka yang aktif di BEM dari tiga Universitas yaitu ITB, UNPAD dan UPI Bandung. Dalam teknik penelitian ini peneliti menggunakan teknik Studi Kasus sehingga penelitian ini di fokuskan pada satu fenomena saja, dengan mengabaikan fenomena-fenomena lainnya

H. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data.

Penelitian kualitatif menuntut perencanaan yang matang untuk menentukan tempat, partisipan dan mulai mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan dalam berbagai jenis data dan berbagai teknik.

Sumber data dan teknik pengumpulan data yang dipilih penulis dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Data

Jenis data yang dipilih oleh penulis adalah data primer dan data sekunder. Jenis Primer yang dipilih penulis adalah persepsi aktivis mahasiswa BEM dari ITB, UNPAD dan UPI Bandung. Serta hasil wawancara kepada pihak yang terkait dalam penelitian ini diantaranya KPU, Humas partai pengusung, tim sukses, dan cagub dan cawagub yang berlatar belakang militer itu sendiri.

Sedangkan jenis data sekunder penulis pilih dari visi dan misi cagub dan cawagub Jabar, buku, artikel ataupun sumber dari internet sebagai analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan dan digunakan untuk menentukan fokus penelitian.

2. Pengumpulan Data.

Agar data yang diperoleh sesuai dengan tujuan yang diharapkan maka peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data, diantaranya sebagai berikut:

1) Interview/wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh informasi atau data dengan cara bertanya langsung kepada responden atau sumber atau pemberi

informasi (informan). Wawancara dilakukan dengan cara komunikasi tatap muka, namun berbeda dengan kegiatan bercakap-cakap seperti yang dilakukan sehari-hari.

....interview adalah percakapan dengan bertatap muka dengan tujuan memperoleh informasi faktual, untuk menaksir dan menilai kepribadian individu, atau untuk tujuan-tujuan konseling/penyuluhan, atau tujuan terapeutis” (Kartini Kartono, 1996:187)

Dalam wawancara ini peneliti memilih sejumlah informan dari aktivis BEM dari tiga Universitas di Bandung yaitu ITB, UNPAD dan UPI Bandung.

3. Studi Literatur

Studi ini dimaksudkan untuk mempelajari buku-buku sumber serta teori-teori yang mendukung dan berhubungan dengan masalah penelitian.

4. Dokumentasi

Dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya. Bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi.

I. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah di lapangan. Dalam Hal ini Nasution (1988) mengatakan bahwa: Analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori yang grounded.

Merujuk pendapat di atas, data yang terkumpul dalam kualitatif diramalkan akan meliputi ratusan kata didalamnya, untuk mempermudah penulis dalam menganalisis data, penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dilapangan dirangkum , dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema atau polanya, jadi laporan sebagai bahan mentah disingkatkan, diberi susunan yang lebih sistematis, sehingga lebih mudah dikendalikan. Data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam.

2. Display Data

Agar dapat melihat gambaran dari keseluruhan, harus dibuat berbagai macam matriks, grafik, charts. Dengan demikian peneliti dapat menguasai data dan tidak tenggelam dalam tumpukan detail. Membuat display ini juga merupakan analisis.

3. Pengambilan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan senantiasa harus diverifikasi selama penelitian berlangsung verifikasi dapat disingkat dengan data baru, dapat pula lebih mendalam bila penelitian dilakukan oleh suatu team untuk mencapai persetujuan bersama agar lebih menjamin validitas.

J. Subjek dan Objek penelitian

1. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini terlebih dahulu dijelaskan mengenai subjek penelitian, S.Nasution (1992:32) menjelaskan bahwa “subjek penelitian yaitu sumber yang dapat memberi informasi, dipilih secara purposif dan pertalian dengan purposif dengan atau tujuan tertentu”. Oleh sebab itu yang menjadi subjek penelitian ini adalah aktivis mahasiswa BEM dari ITB,UNPAD dan UPI Bandung.

2. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah pihak yang terkait dalam penelitian diantaranya KPU, Humas Partai pengusung, tim sukses, dan cagub dan cawagub yang berlatar belakang militer itu sendiri.

K. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan pada tiga Universitas yaitu ITB,UNPAD dan UPI Bandung sedangkan wawancara dengan KPU, Humas Partai pengusung, tim sukses, dan cagub dan cawagub yang berlatar belakang militer akan dilakukan pada tempat yang telah disepehati sebelumnya.